JURNAL ILMU EKONOMI (JIE)
Vol. 5 No. 1, April 2025
https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie
E-ISSN : 2985-4652

UPAH MINIMUM PROVINSI dan LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI terhadap TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA di PROVINSI SUMATERA UTARA

Pany Iglesia M.Simamora[1], Joko Suharianto[2]

[1] Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
[2] Universitas Negeri Medan, Medan, Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

This study was designed with the primary objective of examining the implications of changes in the Provincial Minimum Wage (UMP) and the dynamics of the Economic Growth Rate (LPE) on the Open Unemployment Rate (TPT) in North Sumatra Province from 2009 to 2025. The methodology employed was quantitative, combining descriptive and inferential analysis techniques. The data sources used were secondary data collected from official publications by the Central Statistics Agency (BPS). The data were then processed using an econometric approach using a multiple linear regression model with Ordinary Least Squares (OLS) estimation techniques. The analysis revealed that, individually and collectively, both independent variables had a significant and negative impact on the dependent variable. This indicates that both an increase in the UMP and accelerated economic growth are correlated with a decrease in the unemployment rate. In addition, the magnitude of the coefficient of determination (R^2) which reached 0.7382 confirms that around 73.82% of the variations that occurred in TPT can be explained by the behavior of the variables in the model, while the remaining 26.18% is influenced by external factors that are not included in the specifications of this study.

Keywords: *Provincial Minimum Wage, Economic Growth Rate, Open Unemployment Rate, Multiple Linear Regression, Ordinary Least Squares (OLS)*

ABSTRAK

Studi ini dirancang dengan tujuan utama untuk mengkaji implikasi perubahan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dinamika Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap besaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada kurun waktu 2009 hingga 2025. Metodologi yang diterapkan bersifat kuantitatif dengan memadukan teknik analisis deskriptif dan inferensial. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang dikumpulkan dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS). Selanjutnya, data diolah melalui pendekatan ekonometrika model regresi linear berganda dengan teknik estimasi Ordinary Least Squares (OLS). Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa secara individual maupun kolektif, kedua variabel independen memberikan pengaruh yang nyata dan bersifat negatif terhadap variabel dependen. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan nilai UMP maupun percepatan pertumbuhan ekonomi berkorelasi dengan penurunan tingkat pengangguran. Selain itu, besaran koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 0,7382 menegaskan bahwa sekitar 73,82% variasi yang terjadi pada TPT dapat diterangkan oleh perilaku variabel dalam model, sementara sisanya sebesar 26,18% dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang tidak tercakup dalam spesifikasi penelitian ini.

Kata Kunci: *Upah Minimum Provinsi, Laju Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Regresi Linear Berganda, Ordinary Least Squares (OLS)*

RIWAYAT ARTIKEL
Tersedia *Online*: 25-04-2026

KORESPONDENSI:
Nama : Pany Iglesia M.Simamora
E-mail: iglesiamarsyauli@gmail.com

DOI:
https://doi.org/10.59827/jie.v5i1.379
PENERBIT:
Laboratorium Riset Ekonomi

PENDAHULUAN

Keadaan ketenagakerjaan di setiap wilayah kerap dinilai dengan memanfaatkan Tingkat Pengangguran Terbuka atau TPT sebagai salah satu tolok ukur paling mendasar. Tolok ukur tersebut menggambarkan perbandingan antara banyaknya tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dengan keseluruhan jumlah angkatan kerja yang ada. Oleh karenanya, gambaran menyeluruh mengenai ketersediaan dan keseimbangan pasar tenaga kerja di suatu daerah dapat diperoleh melalui angka TPT tersebut.

Menurut pandangan Qomariyah (2013), pengangguran didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang masuk dalam golongan angkatan kerja namun belum memiliki tempat bekerja, maupun mereka yang saat ini tidak memiliki penghasilan tetap namun tengah melakukan usaha untuk memperoleh pekerjaan. Apabila tingkat pengangguran berada pada angka yang tinggi, hal ini menandakan bahwa lapangan kerja yang tersedia belum mampu menampung seluruh tenaga kerja yang siap bekerja. Keadaan demikian berpotensi memunculkan berbagai akibat yang merugikan, baik dalam lingkup perekonomian maupun tatanan kemasyarakatan; di antaranya meliputi naiknya angka kemiskinan, menurunnya kemampuan kerja dan produktivitas tenaga kerja, serta terhambatnya peningkatan taraf hidup rakyat.

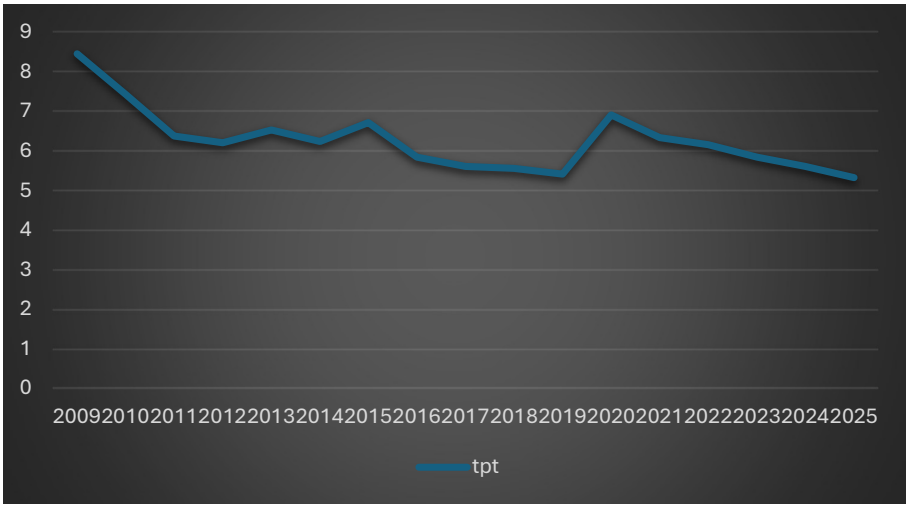
Hingga masa kini, persoalan pengangguran masih menjadi hambatan utama dalam upaya memajukan perekonomian di hampir seluruh wilayah Indonesia, salah satunya yaitu Provinsi Sumatera Utara. Dijelaskan oleh Hidayat dan rekan peneliti (2023), salah satu faktor pokok yang menimbulkan permasalahan dalam bidang ketenagakerjaan adalah ketidaksesuaian laju pertambahan jumlah penduduk yang telah memasuki usia kerja dengan pertumbuhan kesempatan kerja yang tersedia. Ketidakseimbangan tersebut berakibat pada kenaikan nilai TPT dan pada akhirnya menurunkan kualitas kehidupan masyarakat setempat.

Selain itu, kemajuan perekonomian daerah juga dapat terhambat apabila tingkat pengangguran berada dalam taraf yang tinggi. Dijelaskan oleh Suhendra dan Wicaksono (2020), terjadinya pengangguran sering kali dipicu oleh penurunan keinginan masyarakat untuk membeli barang dan jasa; kondisi ini kemudian mengakibatkan berkurangnya jumlah produksi serta berkurangnya kebutuhan akan tenaga kerja baru. Atas dasar pertimbangan tersebut, TPT kerap dipakai sebagai acuan untuk menilai

apakah kebijakan dan upaya pembangunan ekonomi yang diterapkan di suatu daerah telah mencapai tujuannya.

Di lingkup wilayah Sumatera Utara sendiri, nilai TPT tercatat mengalami perubahan naik turun seiring berjalannya waktu. Menurut penjelasan Hidayat dan tim penelitinya (2023), pergerakan angka tersebut dipengaruhi oleh berbagai unsur perekonomian secara menyeluruh, antara lain laju pertumbuhan ekonomi dan penetapan kebijakan upah minimum. Saat pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan, kegiatan usaha dan kebutuhan akan tenaga kerja umumnya juga akan bertambah, sehingga angka pengangguran cenderung menurun. Sebaliknya, apabila laju pertumbuhan ekonomi melambat, ketersediaan kesempatan kerja akan terbatas dan berpotensi menyebabkan kenaikan jumlah pengangguran.

Gambar 1. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) di Provinsi Sumatera Utara Periode 2009–2025



Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah tahun 2026

Analisis terhadap tren perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara selama rentang waktu 2009 hingga 2025 memperlihatkan adanya dinamika yang berfluktuasi. Pada awal pengamatan, tepatnya tahun 2009, besaran TPT tercatat sebesar 8,4%, namun angka ini mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga menyentuh angka 6,2% pada tahun 2012. Selang beberapa tahun sesudahnya, khususnya antara 2013 sampai 2015, indikator tersebut kembali menunjukkan kenaikan, sebelum akhirnya kembali melandai pada periode berikutnya.

Pada kurun waktu 2016–2019, kondisi pasar tenaga kerja di wilayah ini cenderung membaik secara bertahap, yang ditandai dengan penurunan angka

pengangguran hingga berada di level 5,4% pada tahun 2019. Akan tetapi, tahun 2020 mencatat lonjakan yang cukup drastis hingga mendekati angka 6,9%, sebuah fenomena yang merefleksikan adanya guncangan serius pada sektor ketenagakerjaan. Peningkatan ini tidak dapat dilepaskan dari dampak pandemi COVID-19 yang sempat melumpuhkan berbagai sektor ekonomi. Pasca periode krisis tersebut, angka TPT kembali mengalami koreksi menurun secara gradual dan tercatat sekitar 5,3% pada tahun 2025.

Secara umum, meskipun dalam jangka panjang terlihat arah kecenderungan yang menurun, stabilitas angka pengangguran di Sumatera Utara belum sepenuhnya terjamin setiap tahunnya. Ketidakkonsistenan ini memberikan sinyal bahwa penyerapan tenaga kerja masih sangat rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Hasil pengamatan ini selaras dengan pendapat Hidayat dkk. (2023), yang menegaskan bahwa variasi nilai TPT sangat dipengaruhi oleh indikator ekonomi makro, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan regulasi terkait standar upah. Oleh sebab itu, analisis mendalam mengenai determinan yang memengaruhi TPT menjadi sangat krusial untuk memahami dinamika ketenagakerjaan di daerah tersebut.

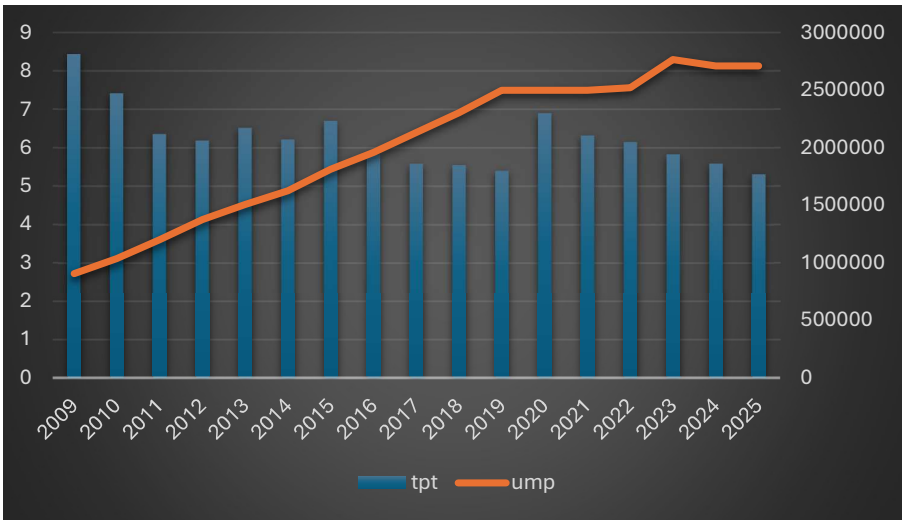
Salah satu variabel kunci yang diduga memiliki implikasi besar terhadap TPT adalah kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP). Instrumen ini merupakan bentuk intervensi pemerintah yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial ekonomi bagi pekerja, dengan menetapkan batas terendah kompensasi yang wajib diberikan oleh pelaku usaha. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dalam hubungan industrial serta menjamin tersedianya pendapatan yang layak bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Menurut definisi Prawiti dkk. (2021), upah minimum merupakan balas jasa dalam bentuk finansial yang diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana implementasinya diharapkan mampu meningkatkan taraf kesejahteraan pekerja.

Dalam teori ekonomi ketenagakerjaan, standar upah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Perubahan skala upah dapat mengubah perilaku baik bagi pencari kerja maupun bagi dunia usaha. Alghofari (2010) berargumen bahwa apabila tingkat penghasilan yang ditawarkan berada di bawah ekspektasi atau standar kelayakan, maka individu cenderung akan menunda untuk memasuki pasar kerja atau mencari alternatif pekerjaan lain, kondisi yang pada akhirnya berpotensi menambah jumlah pengangguran. Hal ini membuktikan bahwa penentuan besaran upah minimum memiliki peran strategis dalam menentukan kondisi pasar tenaga kerja.

Di sisi lain, dari perspektif perusahaan, penyesuaian tingkat upah juga akan memengaruhi keputusan manajemen dalam merekrut sumber daya manusia. Peningkatan beban upah secara langsung akan menaikkan biaya produksi yang harus ditanggung. Hidayat dkk. (2023) menambahkan bahwa perubahan struktur biaya tersebut akan berdampak pada kapasitas penyerapan tenaga kerja. Ketika standar upah dinaikkan, perusahaan akan melakukan efisiensi atau penyesuaian anggaran yang bisa berakibat pada perubahan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Dengan demikian, kebijakan ini menjadi variabel yang sangat menentukan dalam dinamika pengangguran.

Namun demikian, beberapa kajian ilmiah menunjukkan bahwa kenaikan upah minimum tidak selalu berimplikasi negatif terhadap ketersediaan lapangan kerja. Dalam kondisi pasar tertentu, peningkatan upah justru dapat memperluas kesempatan kerja melalui mekanisme peningkatan daya beli masyarakat dan stimulasi aktivitas ekonomi. Hal ini didukung oleh temuan Hidayat dkk. (2023) yang menemukan adanya hubungan negatif dan signifikan antara upah minimum dengan tingkat pengangguran di Sumatera Utara. Artinya, kenaikan standar upah justru dapat mendorong perbaikan kesejahteraan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia kerja.

Gambar 2. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Upah Minimum Provinsi (Rupiah) di Provinsi Sumatera Utara Periode 2009–2025



Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah tahun 2026

Analisis data mengenai perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Upah Minimum Provinsi (UMP) di Sumatera Utara selama rentang waktu 2009–2025 mengungkapkan bahwa besaran UMP senantiasa mengalami kenaikan secara berkelanjutan setiap tahunnya. Berbeda halnya dengan TPT yang menunjukkan tren

penurunan jangka panjang, meskipun masih terjadi volatilitas pada masa-masa tertentu. Pada awal periode pengamatan, angka pengangguran tercatat melebihi 8 persen, namun secara bertahap mengalami perbaikan hingga mendekati ambang batas 5 persen di tahun-tahun selanjutnya. Meskipun demikian, tahun 2020 menjadi anomali tersendiri dengan terjadinya lonjakan TPT yang cukup signifikan, kondisi yang sangat berkaitan dengan kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan terbatasnya kesempatan kerja.

Secara umum, pola pergerakan kedua variabel tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang berbanding terbalik. Peningkatan standar upah yang terjadi secara terus-menerus tampak diiringi dengan kecenderungan penurunan jumlah pengangguran. Fenomena ini memberikan indikasi bahwa kenaikan upah minimum berpotensi memperbaiki taraf hidup pekerja sekaligus menggerakkan roda perekonomian, yang pada gilirannya mampu memperluas daya serap terhadap tenaga kerja. Hasil observasi ini memperkuat argumen Hidayat dkk. (2023), yang menegaskan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari kebijakan upah minimum terhadap tingkat pengangguran di wilayah tersebut.

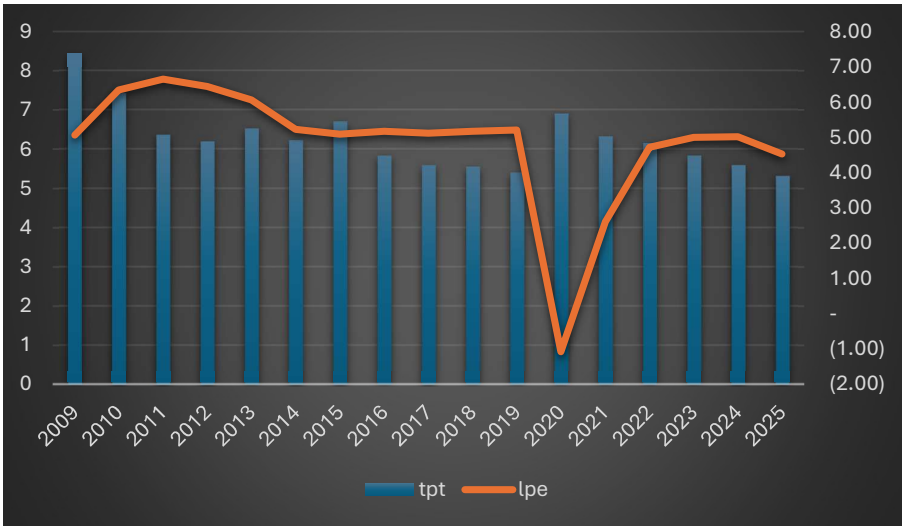
Di samping faktor penetapan upah, laju pertumbuhan ekonomi juga merupakan determinan krusial yang turut membentuk kondisi ketenagakerjaan. Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya merefleksikan perluasan aktivitas ekonomi daerah, yang ditandai dengan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu kurun waktu. Apabila kegiatan ekonomi mengalami ekspansi, permintaan terhadap sumber daya manusia akan cenderung meningkat, yang selanjutnya berpotensi menekan angka pengangguran. Dengan demikian, semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai, semakin luas pula peluang bagi terciptanya lapangan kerja baru.

Menurut Sukirno, perkembangan ekonomi sangat dipengaruhi oleh peningkatan output agregat serta perubahan jumlah penduduk. Dalam kerangka kajian ini, pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai peningkatan skala aktivitas ekonomi yang tercermin dari bertambahnya volume produksi dan kenaikan tingkat pendapatan masyarakat. Peningkatan kapasitas ekonomi tersebut mendorong dunia usaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga kebutuhan akan tambahan tenaga kerja menjadi tak terelakkan. Hal ini menegaskan bahwa dinamika ekonomi memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan kemampuan daerah dalam menyerap angkatan kerja.

Hubungan timbal balik antara pertumbuhan ekonomi dan pengangguran juga ditekankan oleh Suhendra dan Wicaksono (2020), yang menyimpulkan adanya korelasi negatif di antara keduanya. Artinya, peningkatan kinerja ekonomi akan diikuti oleh perbaikan dalam penyerapan tenaga kerja, karena ekspansi aktivitas ekonomi mampu membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk bekerja. Oleh sebab itu, pencapaian pertumbuhan ekonomi yang optimal dianggap sebagai kunci utama dalam menyelesaikan permasalahan ketenagakerjaan.

Hal senada juga diperkuat oleh temuan penelitian Hidayat dkk. (2023), yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di Sumatera Utara. Kondisi ini menandakan bahwa akselerasi ekonomi mampu mendorong peningkatan kegiatan produksi dan menumbuhkan iklim investasi yang kondusif, yang pada akhirnya menyerap lebih banyak tenaga kerja dan menurunkan angka pengangguran. Oleh karena itu, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor penentu dalam mengatur dinamika pasar tenaga kerja di daerah tersebut.

Gambar 3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (%) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) di Provinsi Sumatera Utara Periode 2009–2025



Sumber: BPS Sumatera Utara, data diolah tahun 2026

Analisis terhadap data perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di Provinsi Sumatera Utara selama kurun waktu 2009–2025 memperlihatkan bahwa kinerja ekonomi mengalami volatilitas yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Pada fase-fase tertentu, akselerasi ekonomi yang terjadi ternyata diiringi dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan yang ditandai dengan penurunan angka pengangguran. Fenomena ini sangat terlihat jelas pada rentang tahun

2010–2014 maupun periode 2016–2019, di mana saat perekonomian berjalan relatif stabil dan kondusif, indikator TPT justru menunjukkan tren yang menurun. Keadaan ini memberikan sinyal kuat bahwa ekspansi aktivitas ekonomi mampu mendorong peningkatan kapasitas produksi dan menumbuhkan iklim investasi, yang pada akhirnya membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan.

Akan tetapi, tahun 2020 mencatat anomali yang cukup signifikan di mana terjadi kontraksi ekonomi yang cukup dalam hingga menyentuh wilayah negatif, yang berbanding lurus dengan melonjaknya angka pengangguran. Fenomena ini tidak terlepas dari dampak disrupsi sistemik akibat pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya berbagai sektor usaha. Melemahnya roda perekonomian tersebut memaksa banyak entitas bisnis untuk melakukan efisiensi operasional, termasuk dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja atau bahkan memberhentikan karyawan. Akibatnya, kapasitas penyerapan tenaga kerja menurun drastis dan berkontribusi besar terhadap peningkatan TPT pada tahun tersebut.

Secara garis besar, pola hubungan yang terbangun antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran memperlihatkan adanya korelasi yang berlawanan arah. Peningkatan kinerja ekonomi umumnya akan diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran, seiring dengan meluasnya kesempatan kerja yang tercipta. Hal ini sejalan dengan argumen yang dikemukakan oleh Suhendra dan Wicaksono (2020), yang menegaskan adanya hubungan negatif di antara kedua variabel tersebut, di mana kemajuan aktivitas ekonomi menjadi pendorong utama bagi peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Temuan tersebut juga diperkuat oleh hasil kajian Hidayat dkk. (2023), yang membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap TPT di Sumatera Utara. Hal ini bermakna bahwa setiap peningkatan laju ekonomi berpotensi memperluas akses pekerjaan melalui stimulasi kegiatan produksi dan investasi, sehingga beban pengangguran dapat dikurangi. Oleh karena itu, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi merupakan variabel kunci yang sangat menentukan dalam dinamika pasar tenaga kerja di wilayah tersebut.

Bertolak dari uraian latar belakang yang telah disampaikan, sejumlah persoalan penting dapat diidentifikasi dalam kajian ini.

1. Dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara cenderung mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu. Kondisi tersebut

mencerminkan bahwa proses penyerapan tenaga kerja belum berjalan secara konsisten serta belum mencapai tingkat yang optimal.

2. Perubahan pada Tingkat Pengangguran Terbuka diduga tidak terlepas dari pengaruh kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP), yang berpotensi memengaruhi keputusan pelaku usaha dalam merekrut tenaga kerja.
3. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diperkirakan turut memberikan kontribusi terhadap variasi Tingkat Pengangguran Terbuka, sehingga hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kondisi ketenagakerjaan menjadi aspek yang perlu dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bagian latar belakang, persoalan utama dalam kajian ini dapat dirumuskan ke dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap besaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Sumatera Utara selama kurun waktu 2009–2025?
2. Sejauh mana Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berkontribusi dalam memengaruhi dinamika Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara pada periode 2009–2025?
3. Apakah variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara simultan memiliki pengaruh terhadap perubahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2009–2025?

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, penelitian ini dilaksanakan dengan maksud untuk:

1. Menganalisis implikasi yang muncul akibat penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sumatera Utara pada rentang waktu 2009–2025.
2. Mengidentifikasi sejauh mana peranan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dalam memengaruhi tingkat ketersediaan kerja yang tercermin melalui TPT di Sumatera Utara selama periode 2009–2025.
3. Mengetahui pengaruh gabungan antara faktor Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara bersama-sama terhadap variabel Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah tersebut.

TELAAH LITERATUR

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam analisis ekonomi makro, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sering dijadikan sebagai indikator fundamental untuk mengevaluasi kondisi pasar tenaga kerja di suatu wilayah. Besaran TPT pada dasarnya merepresentasikan proporsi dari angkatan kerja yang saat ini belum memiliki pekerjaan namun masih berupaya secara aktif untuk mendapatkannya. Oleh karena itu, indikator ini dianggap mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai situasi ketenagakerjaan sekaligus menjadi tolak ukur efektivitas pembangunan ekonomi yang telah dicapai.

Di samping itu, fenomena pengangguran juga memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan dinamika demografi. Menurut Murni (2016), permasalahan pengangguran tidak dapat dilepaskan dari laju pertambahan penduduk yang terus berlangsung. Apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak diimbangi dengan perluasan kesempatan kerja yang memadai, maka hal ini akan menimbulkan tekanan yang cukup besar bagi pasar tenaga kerja.

B. Upah Minimum Provinsi

Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan bentuk intervensi pemerintah dalam sektor ketenagakerjaan yang bertujuan untuk menjamin kelayakan hidup para pekerja. Kebijakan ini menetapkan batas terendah kompensasi yang wajib diberikan oleh perusahaan kepada tenaga kerjanya sebagai imbalan atas jasa yang diberikan.

Menurut pandangan Latri Wihastuti dan Henny Rahmatullah (2017), besaran UMP termasuk dalam variabel ekonomi yang memiliki implikasi cukup besar terhadap kapasitas penyerapan tenaga kerja. Lebih lanjut, Indrawan Saputra dkk. (2023) menambahkan bahwa kebijakan upah minimum juga berkaitan erat dengan tingkat kesejahteraan pekerja serta stabilitas perekonomian daerah secara keseluruhan.

Dengan demikian, Upah Minimum Provinsi dapat dimaknai sebagai standar remunerasi yang ditetapkan tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pekerja, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menunjang pertumbuhan ekonomi.

C. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dikenal sebagai salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai keberhasilan proses pembangunan, baik pada skala nasional maupun daerah. Indikator ini pada dasarnya menggambarkan peningkatan kapasitas ekonomi suatu wilayah dalam menghasilkan berbagai jenis barang dan jasa selama periode tertentu.

Sadono Sukirno (2016) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan output per kapita yang terjadi dalam jangka panjang, yang secara langsung merefleksikan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat. Definisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan sekadar peningkatan kuantitas produksi semata, melainkan juga mencakup aspek peningkatan kesejahteraan.

Dalam kajian ekonomi, indikator ini sering digunakan untuk menganalisis berbagai persoalan sosial, termasuk masalah pengangguran dan kemiskinan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi umumnya akan mendorong ekspansi usaha dan investasi, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Sebaliknya, perlambatan ekonomi cenderung membatasi ruang gerak dunia usaha, sehingga kesempatan kerja yang tersedia menjadi terbatas.

Hal tersebut selaras dengan hasil penelitian Furuoka (2014), yang menemukan adanya hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran. Artinya, peningkatan kinerja ekonomi biasanya akan diikuti dengan penurunan jumlah pengangguran. Senada dengan hal itu, Islam (2015) juga menegaskan bahwa akselerasi kegiatan ekonomi merupakan kunci utama dalam membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

D. Hipotesis Penelitian

a. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) diterapkan dengan tujuan utama untuk menjamin kelayakan penghasilan pekerja. Peningkatan standar upah berpotensi meningkatkan daya beli masyarakat yang selanjutnya dapat mendorong roda perekonomian. Hidayat dkk. (2023) menyatakan bahwa besaran upah memiliki keterkaitan yang erat dengan dinamika pasar tenaga kerja. Kenaikan upah yang layak dapat memperbaiki kesejahteraan sekaligus meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja, yang pada akhirnya berdampak positif pada penyerapan tenaga kerja.

H1: Upah Minimum Provinsi (UMP) diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

b.Laju Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka

Laju Pertumbuhan Ekonomi merefleksikan perkembangan aktivitas produksi dalam suatu perekonomian. Kondisi ekonomi yang tumbuh dengan baik menandakan adanya peningkatan output dan ekspansi usaha yang berpotensi menyerap lebih banyak tenaga kerja.

Menurut Sadono Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai peningkatan kapasitas produksi dalam jangka panjang yang berimplikasi pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Taufik Alfatar dan Daryono Soebagiyo (2023), yang menjelaskan bahwa perluasan aktivitas ekonomi akan mendorong peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia. Akibatnya, kesempatan kerja menjadi lebih luas dan tingkat pengangguran dapat ditekan. Temuan ini juga didukung oleh hasil penelitian Belloumi (2014) yang menegaskan adanya hubungan erat antara pertumbuhan ekonomi dengan penyerapan tenaga kerja.

H2: Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) diduga memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

METODE PENELITIAN

Kajian ini menerapkan metodologi kuantitatif dengan desain penelitian eksplanatif yang bersifat kausal. Tujuan utama dari penerapan desain ini adalah untuk menguji keterkaitan sebab-akibat yang terjadi antara variabel bebas dan variabel terikat melalui proses verifikasi hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik.

Cakupan populasi dalam riset ini meliputi seluruh informasi statistik yang berkaitan dengan dinamika ketenagakerjaan serta variabel-variabel ekonomi makro di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Data yang dijadikan sebagai unit analisis merupakan data runtut waktu (time series) yang diambil berdasarkan ketersediaan informasi selama kurun waktu 2009 hingga 2025, sehingga secara keseluruhan diperoleh sebanyak 17 titik data pengamatan.

Seluruh informasi yang digunakan dalam penulisan ini dikategorikan sebagai data sekunder yang diperoleh dari laporan resmi yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, ditunjang dengan berbagai referensi ilmiah yang terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode studi dokumentasi, yakni dengan cara mengumpulkan, mencatat, dan mengkaji kembali data-data yang telah dipublikasikan sebelumnya.

Dalam penelitian ini, variabel dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen yang diteliti adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang dinyatakan dalam satuan persentase, yang merepresentasikan perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan total angkatan kerja secara keseluruhan. Di sisi lain, variabel independen terdiri dari besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dihitung dalam satuan mata uang Rupiah, serta Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang dinyatakan dalam persentase berdasarkan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Metode analisis yang diterapkan untuk mengolah data adalah analisis regresi linear berganda dengan pendekatan Ordinary Least Squares (OLS), di mana proses pengolahan datanya dilakukan dengan memanfaatkan perangkat lunak EViews versi 10. Model matematis yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antarvariabel tersebut adalah sebagai berikut:

$$TPT_t=\alpha+\beta 1UMP_t+\beta 2LPE_t+\varepsilon t$$

Keterangan :

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka (%)

α = Konstanta

$\beta 1, \beta 2$ = Koefisien regresi

UMP = Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

LPE = Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)

ε = Error term

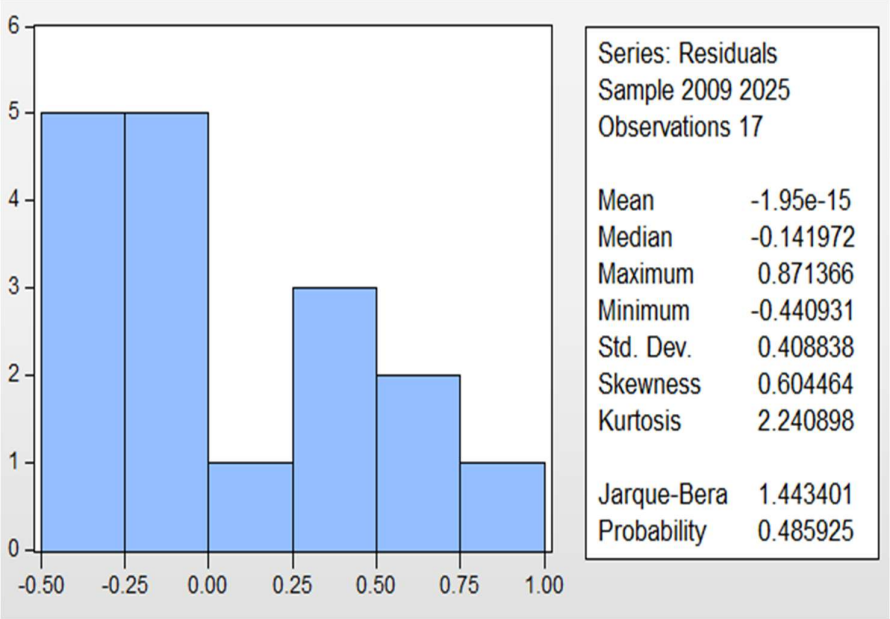
t = Waktu

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

a. Uji Normalitas

Gambar 4 Uji Normalitas



Sumber: Olahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 10, tahun 2026

Analisis distribusi data dilakukan melalui pendekatan statistik Jarque-Bera. Dari proses komputasi tersebut, didapatkan besaran probabilitas sebesar 0,485925. Apabila dikontraskan dengan taraf signifikansi yang ditetapkan sebesar 0,05, nilai yang diperoleh ternyata jauh lebih besar. Kondisi ini memberikan bukti yang kuat bahwa komponen residual yang terbentuk dalam persamaan matematis telah menyebar secara normal. Dengan demikian, syarat fundamental mengenai kenormalan data telah berhasil dipenuhi, sehingga prosedur pengujian dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.

b. Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan-Godfrey)

Pemeriksaan terhadap kesamaan varians error dilakukan dengan menerapkan teknik Breusch-Pagan-Godfrey.

Gambar 5 Uji Heteroskedastisitas (Breusch-Pagan-Godfrey)

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	1.573069	Prob. F(2,14)	0.2420
Obs*R-squared	3.119323	Prob. Chi-Square(2)	0.2102
Scaled explained SS	1.312577	Prob. Chi-Square(2)	0.5188

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 04/23/26 Time: 19:31
Sample: 2009 2025
Included observations: 17

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.446112	0.259361	1.720039	0.1074
UMP	-1.30E-07	7.97E-08	-1.635872	0.1241
LPE	-0.005707	0.028158	-0.202663	0.8423

R-squared	0.183490	Mean dependent var	0.157316
Adjusted R-squared	0.066845	S.D. dependent var	0.180637
S.E. of regression	0.174495	Akaike info criterion	-0.495057
Sum squared resid	0.426279	Schwarz criterion	-0.348019
Log likelihood	7.207980	Hannan-Quinn criter.	-0.480441
F-statistic	1.573069	Durbin-Watson stat	1.492746
Prob(F-statistic)	0.241954		

Sumber: Olahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 10, tahun 2026

Hasil kalkulasi menunjukkan nilai probabilitas untuk ObsR-squared adalah sebesar 0,2102. Angka ini secara jelas menampakkan posisinya di atas ambang batas signifikansi 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, hal ini menegaskan bahwa tidak terdapat gejala ketidaksamaan varians atau heteroskedastisitas dalam model yang dibangun. Konsekuensinya, asumsi homoskedastisitas terjamin dan spesifikasi model dinyatakan valid untuk proses analisis data.c. Uji Multikolineritas (VIF)

Gambar 6 Uji Multikolineritas (VIF)

Variance Inflation Factors
Date: 04/23/26 Time: 19:34
Sample: 2009 2025
Included observations: 17

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	0.422026	37.55726	NA
UMP	3.98E-14	15.53946	1.314912
LPE	0.004974	11.73284	1.314912

Sumber: Olahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 10, tahun 2026

Untuk mendeteksi adanya hubungan linear antar-peubah bebas, digunakan metode Variance Inflation Factor (VIF). Eksplorasi data menunjukkan besaran Centered

VIF untuk variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) masing-masing tercatat pada angka 1,314912. Mengacu pada standar statistik yang umum digunakan, nilai tersebut masih berada jauh di bawah ambang batas kritis 10. Fakta ini membuktikan bahwa tidak ada persoalan multikolinearitas yang signifikan antar variabel penelitian. Hal ini menandakan bahwa model telah lolos dari salah satu ujian asumsi klasik dan siap untuk diestimasi lebih lanjut.

d. Uji Autokorelasi (Breusch-Godfrey LM Test)

Gambar 7 Uji Autokerelasi (Breusch-Godfrey LM Test)

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1.146445	Prob. F(2,12)	0.3502
Obs*R-squared	2.727170	Prob. Chi-Square(2)	0.2557

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 04/23/26 Time: 19:29
Sample: 2009 2025
Included observations: 17
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.071746	0.655141	0.109513	0.9146
UMP	-1.95E-08	1.98E-07	-0.098309	0.9233
LPE	-0.007780	0.072295	-0.107612	0.9161
RESID(-1)	0.433745	0.287928	1.506438	0.1578
RESID(-2)	-0.198289	0.296646	-0.668438	0.5165

R-squared	0.160422	Mean dependent var	-1.95E-15
Adjusted R-squared	-0.119438	S.D. dependent var	0.408838
S.E. of regression	0.432565	Akaike info criterion	1.401759
Sum squared resid	2.245348	Schwarz criterion	1.646822
Log likelihood	-6.914955	Hannan-Quinn criter.	1.426119
F-statistic	0.573223	Durbin-Watson stat	1.702075
Prob(F-statistic)	0.687359		

Sumber: Olahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 10, tahun 2026

Diagnostik terhadap keterkaitan antar residual dilakukan melalui prosedur Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test. Berdasarkan output komputasi, nilai probabilitas Chi-Square yang berhasil dihitung adalah sebesar 0,2557. Karena besaran ini masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan level signifikansi 5% atau 0,05, maka dapat diartikan bahwa tidak ditemukan bukti adanya autokorelasi dalam komponen galat model. Implikasinya, syarat mengenai independensi atau ketidakbergantungan error telah terpenuhi sempurna, sehingga kelayakan model untuk digunakan dalam analisis semakin terjamin.

e. Analisis Regresi Linear Berganda

Estimasi parameter model dilakukan dengan memanfaatkan teknik Ordinary Least Squares (OLS), yang menghasilkan bentuk fungsi sebagai berikut:

$$TPTt = 9.9989 - 1.2560UMPt - 0.2547LPEt$$

Interpretasi dari persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstan sebesar 9.9989 merefleksikan besaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada kondisi ketika seluruh variabel independen dianggap nol atau tidak memberikan kontribusi apapun. Sementara itu, koefisien regresi untuk UMP sebesar -1.2560 menandakan adanya hubungan terbalik; setiap kenaikan satu satuan nilai UMP akan direspon oleh penurunan tingkat pengangguran sebesar 1.2560 poin, dengan catatan variabel lainnya dalam keadaan tetap. Hal serupa juga berlaku untuk LPE dengan koefisien -0.2547, yang bermakna bahwa peningkatan laju ekonomi sebesar satu persen berpotensi menurunkan angka pengangguran hingga 0.2547 poin.

Secara individual, pengaruh kedua faktor tersebut terbukti sangat nyata, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai probabilitas masing-masing di bawah 0,05 (UMP = 0.0000 dan LPE = 0.0028). Dalam skala keseluruhan, hasil uji statistik F mencatat nilai probabilitas sebesar 0.000084, yang mengonfirmasi bahwa UMP dan LPE secara kolektif mampu menjelaskan pergerakan TPT. Selain itu, koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.7382 mengindikasikan bahwa sekitar 73,82% fluktuasi yang terjadi pada variabel terikat dapat diterangkan oleh perilaku variabel bebas, sedangkan sisanya sebesar 26,18% dipengaruhi oleh elemen-elemen lain yang tidak tercakup dalam kerangka penelitian ini.

f. Uji T (Parsial)

Tabel 1 Uji T (Parsial)

Variabel	T-hitung	T-tabel	Prob	Standar Sig
UMP	-6,250417	2,160	0,0000	0,05
LPE	-3,611973	2,160	0,0028	0,05

Sumber : Olahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 10, tahun 2026

Verifikasi pengaruh secara terpisah dilakukan dengan membandingkan nilai statistik hitung dan tabel. Untuk variabel Upah Minimum Provinsi (UMP), nilai t-statistik tercatat sebesar -6,250417 dengan tingkat keyakinan 0,0000. Karena nilai probabilitas ini jauh di bawah 0,05, maka dapat ditegaskan bahwa UMP memberikan dampak negatif yang sangat

berarti terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Pola yang identik terlihat pada variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), di mana t-hitung mencapai -3,611973 dan probabilitas 0,0028. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa secara parsial, kedua variabel eksogen tersebut merupakan determinan signifikan yang mempengaruhi tingkat pengangguran.

g. Uji F (Simultan)

Tabel 2 Uji F (Simultan)

F-statistic	F-tabel	Prob	Standar Sig	Ket
19,73502	3,74	0,000084	0,05	Signifikan

Sumber : Eviews 10, data diolah tahun 2026

Pengujian secara bersama-sama menghasilkan nilai F-statistik sebesar 19,73502, di mana besaran ini secara signifikan lebih besar jika dibandingkan dengan nilai kritis F-tabel sebesar 3,74. Selain itu, tingkat signifikansi yang diperoleh adalah sebesar 0,000084, yang nilainya berada di bawah ambang batas 0,05. Dari data tersebut, dapat ditarik inferensi bahwa variabel Upah Minimum Provinsi dan Laju Pertumbuhan Ekonomi memiliki kontribusi yang nyata dan simultan dalam mempengaruhi variabel dependen, yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka

h. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 3 Uji R2

R-squared	Adjusted R-squared
0,7382	0,7008

Sumber : Olahan data menggunakan perangkat lunak Eviews 10, tahun 2026

Besaran goodness of fit model ditunjukkan oleh nilai R-square yang mencapai 0,7382. Angka ini menerangkan bahwa proporsi keragaman pada Tingkat Pengangguran Terbuka yang mampu dijelaskan oleh model adalah sebesar 73,82%, sedangkan faktor-faktor eksternal di luar lingkup studi ini berkontribusi terhadap sisanya sebesar 26,18%. Di sisi lain, nilai Adjusted R-squared sebesar 0,7008 memberikan gambaran mengenai akurasi model yang telah dikalibrasi dengan memperhitungkan jumlah variabel penjelas yang digunakan, sehingga menghasilkan estimasi yang lebih presisi dan tidak bias.

B. Pembahasan

Analisis estimasi melalui model regresi linear berganda berhasil mengungkap adanya keterkaitan yang erat antara variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Nilai intersep yang tercatat sebesar 9,9989 memberikan gambaran bahwa besaran pengangguran akan berada pada posisi tersebut manakala tidak terdapat perubahan apapun pada faktor-faktor penjelas dalam model. Selain itu, polaritas koefisien yang bertanda negatif pada kedua variabel mengindikasikan adanya hubungan yang berlawanan arah; di mana setiap peningkatan nilai UMP maupun percepatan pertumbuhan ekonomi cenderung direspon oleh penurunan angka pengangguran. Dinamika ini memperkuat argumen dalam teori ekonomi pembangunan yang menekankan peran krusial kebijakan makroekonomi dalam menentukan kondisi pasar tenaga kerja.

Secara individual, variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) terbukti memberikan dampak yang nyata dan bersifat negatif terhadap TPT, sebagaimana dikonfirmasi oleh nilai probabilitas sebesar 0,0000 yang jauh di bawah ambang batas 0,05. Hasil ini menegaskan bahwa penyesuaian besaran upah minimum memiliki potensi untuk menekan laju pengangguran. Secara teoritis, kenaikan standar upah berimplikasi pada meningkatnya daya beli masyarakat, yang selanjutnya akan menggerakkan permintaan agregat atas berbagai komoditas dan jasa. Meningkatnya permintaan pasar ini pada akhirnya akan memicu produsen untuk memperluas kapasitas produksi dan merekrut tambahan tenaga kerja. Temuan ini konsisten dengan pandangan Sadono Sukirno (2016), yang menegaskan bahwa pertumbuhan pendapatan masyarakat akan memperkuat konsumsi agregat, yang pada gilirannya mendorong ekspansi produksi dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar.

Di sisi lain, variabel Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) juga menunjukkan pengaruh yang negatif dan statistiknya signifikan, dengan tingkat probabilitas tercatat sebesar 0,0028. Hal ini bermakna bahwa ekspansi ekonomi yang positif cenderung berkorelasi dengan perbaikan kondisi ketenagakerjaan. Mekanisme ini bekerja melalui peningkatan aktivitas bisnis dan realisasi investasi yang menciptakan lapangan kerja baru bagi angkatan kerja. Sesuai dengan pendapat Sadono Sukirno (2016), pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan merupakan prasyarat utama dalam memperluas basis kesempatan kerja serta menekan angka pengangguran ke level yang lebih rendah.

Pengujian secara simultan pun memberikan hasil yang signifikan, di mana nilai probabilitas uji F sebesar 0,000084 terbukti berada di bawah taraf signifikansi 5%. Konstatasi ini membuktikan bahwa UMP dan LPE secara kolektif memiliki kekuatan

penjelas yang memadai dalam mempengaruhi variasi Tingkat Pengangguran Terbuka. Dalam kerangka ekonomi makro, hal ini menegaskan bahwa kebijakan penetapan upah dan dinamika pertumbuhan ekonomi merupakan dua pilar utama yang saling melengkapi dalam menentukan keseimbangan dan efisiensi pasar tenaga kerja.

Lebih jauh lagi, besaran koefisien determinasi (R^2) yang mencapai 0,7382 mengindikasikan bahwa sekitar 73,82% perubahan yang terjadi pada tingkat pengangguran dapat diterangkan oleh perilaku kedua variabel independen tersebut. Sementara itu, sisanya sebesar 26,18% dipengaruhi oleh variasi faktor-faktor lain yang tidak tercakup dalam spesifikasi model, seperti kualifikasi pendidikan, akumulasi modal atau investasi, serta karakteristik struktural pasar tenaga kerja itu sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Gregory Mankiw (2018) yang menyatakan bahwa fenomena pengangguran merupakan hasil interaksi yang kompleks dari berbagai determinan ekonomi.

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Studi ini dilaksanakan dengan tujuan utama untuk menganalisis implikasi dari variasi Upah Minimum Provinsi (UMP) dan dinamika Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) terhadap besaran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di wilayah Provinsi Sumatera Utara selama rentang waktu 2009 hingga 2025. Berdasarkan hasil eksplorasi data, dapat ditegaskan bahwa kedua faktor tersebut memberikan dampak yang nyata terhadap variasi tingkat pengangguran. Secara individual, UMP terbukti memiliki korelasi negatif yang signifikan, yang bermakna bahwa peningkatan standar upah memiliki potensi untuk menekan angka pengangguran melalui mekanisme perbaikan daya beli masyarakat dan percepatan roda ekonomi. Demikian halnya dengan LPE, di mana pertumbuhan ekonomi yang positif terbukti efektif dalam membuka kesempatan kerja baru serta memperluas kapasitas penyerapan tenaga kerja.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa secara kolektif, UMP dan LPE memiliki pengaruh simultan yang kuat terhadap TPT. Hal ini memperkuat argumen bahwa formulasi kebijakan pengupahan serta strategi pengembangan ekonomi merupakan variabel krusial dalam menentukan stabilitas pasar tenaga kerja. Oleh sebab itu, dapat

ditarik inferensi bahwa optimalisasi kedua variabel tersebut berperan sentral dalam upaya penurunan tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. Implikasinya, diperlukan sinergi kebijakan yang komprehensif guna mendorong ekspansi ekonomi yang berkelanjutan disertai dengan penetapan skala upah yang adil, sehingga tujuan penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara maksimal.

B. Saran

Merujuk pada temuan penelitian, direkomendasikan agar pemerintah daerah merumuskan kebijakan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan pendekatan yang proporsional. Penetapan besaran upah idealnya mempertimbangkan aspek kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan aspek kelayakan dan daya tahan dunia usaha. Di samping itu, upaya stimulasi pertumbuhan ekonomi harus terus didorong melalui intensifikasi investasi dan iklim bisnis yang kondusif. Mengingat peran strategis kedua variabel ini dalam mengendalikan pengangguran, maka pengelolaannya perlu dilakukan secara seimbang dan terintegrasi dalam kerangka pembangunan ekonomi daerah.

Secara metodologis, penelitian ini telah berhasil menjawab rumusan masalah mengenai hubungan antara UMP dan LPE terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka. Namun demikian, studi ini masih memiliki keterbatasan terutama dari segi cakupan variabel yang digunakan dan lokus penelitian. Untuk itu, kajian di masa mendatang disarankan untuk memperluas spesifikasi model dengan memasukkan variabel-variabel lain yang relevan serta memperluas objek kajian ke wilayah yang lebih beragam, sehingga analisis yang dihasilkan dapat menjadi lebih komprehensif dan generalisasi kesimpulannya menjadi lebih kuat.

REFERENSI

Adlan, S., Idris, & Zaini, D. (2015). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran pada kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Ecosains.* 4(1), 73–78. https://ojs.unp.ac.id/index.php/ecosains

Alghofari, F. (2010). Analisis tingkat pengangguran di Indonesia. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 8(2), 45 – 56.

https://scholar.google.com/scholar?q=Analisis+tingkat+pengangguran+di+Indonesia+Alghofari+2010

Belloumi, M. (2014). The relationship between trade, FDI and economic growth. *Economic Systems*, 38(2), 269–287. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2013.11.001

Creswell, John W. 2018. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage Publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/research-design/book255675

Ferdiansyah, Ihza Wahyu, dan Syah Riza Octavy. 2023. *Penerapan Hygiene dan Sanitasi di Kitchen Aston Jember Hotel & Conference Center*. Jurnal Pariwisata dan Perhotelan, Vol. 1 No. 1, hlm. 1–8. https://journal.pubmedia.id/index.php/pjpp

Furuoka, F. (2014). Unemployment and economic growth in ASEAN countries. *Economic Analysis and Policy*, 44(1), 1–10. https://doi.org/10.1016/j.eap.2014.01.002

Hamidan, Mohammad Jabar, dkk. 2024. *Analisis Pengaruh Angkatan Kerja dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Kendari*. Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP), Vol. 9 No. 2, hlm. 291–300. http://ojs.uho.ac.id/index.php/JPEP

Hidayat, N., Nugrahadi, E. W., Rahman, H., & Daoni, F. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum terhadap angka pengangguran di Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 18(2), 193–202. https://doi.org/10.55981/jki.2023.1074

Indrawan, R., Saputra, D., & Pratama, Y. (2023). *Analisis pengaruh upah minimum terhadap kesejahteraan tenaga kerja*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(1), 33–47. https://scholar.google.com/scholar?q=Analisis+pengaruh+upah+minimum+terhadap+kesejahteraan+tenaga+kerja

Islam, R. (2015). *Economic growth and unemployment relationship*. International Journal of Economics and Finance, 7(8), 1–8. https://doi.org/10.5539/ijef.v7n8p1

Mankiw, N. G. (2018). *Principles of economics* (8th ed.). Cengage Learning. https://scholar.google.com/scholar?q=Principles+of+Economics+Mankiw+8th+edition

Prawiti, L., Rahmawati, N., & Putra, B. (2021). *Pengaruh kebijakan upah minimum terhadap tenaga kerja*. Jurnal Ketenagakerjaan, 6(2), 55–68. https://scholar.google.com/scholar?q=Pengaruh+kebijakan+upah+minimum+terhadap+tenaga+kerja

Qomariyah, S. (2013). *Dampak pengangguran terhadap perekonomian*. Jurnal Ilmu Ekonomi, 4(1), 21–30. https://scholar.google.com/scholar?q=Dampak+pengangguran+terhadap+perekonomian+Qomariyah

Saputra, Indrawan, Ayu Lestari Doloksaribu, dan Alexandra Hukom. 2024. *Analisis Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Upah Minimum Provinsi (UMP), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengah*. Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2 No. 5, hlm. 51–64. http://jurnal.anfa.co.id/index.php/mufakat

Suhendra, I., & Wicaksono, R. (2020). *Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 9(1), 1–10. https://scholar.google.com/scholar?q=Hubungan+pertumbuhan+ekonomi+dan+pengangguran+di+Indonesia

Sukirno, S. (2016). Makroekonomi: teori pengantar. Rajawali Pers https://scholar.google.com/scholar?q=Makroekonomi+Teori+Pengantar+Sukirno

Taufik, A., & Soebagiyo, D. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Jurnal Ekonomi Pembangunan 11(2), 77-89. https://scholar.google.com/scholar?q=Pengaruh+pertumbuhan+ekonomi+terhadap+penyerapan+tenaga+kerja

Wihastuti, Latri, dan Henny Rahmatullah. 2018. *Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa*. Jurnal Gama Societa, Vol. 1 No. 1, hlm. 96–102. https://jurnal.ugm.ac.id/gamasocieta/article/view/31763

World Bank. (2022). *Employment and unemployment trends*. World Bank Publications. https://www.worldbank.org/en/topic/jobsanddevelopment